

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola fiscal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini **telah** diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Laporan Keuangan BKKBN tahun anggaran 2010 **audited** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BKKBN Tahun Anggaran 2010 **audited** ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan disusun secara berjenjang.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar Rp. 16.353.430.913,- terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.353.430.913,-

Realisasi Belanja Negara berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.333.579.517.155,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 826.200.629,- sehingga realisasi bersih menjadi sebesar Rp. 1.332.753.316.526,- atau 97,06% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 1.309.672.923.810,- atau 97,34% dari anggarannya. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 23.080.392.716,- atau 83,75% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel : I**

	(dalam rupiah)			
	TA 2010		TA 2009	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	11.644.920	16.353.430.913	48.507.024	1.396.413.828
Belanja RM	1.334.124.500.000	1.299.147.984.583	1.181.586.430.000	1.135.845.976.485
Belanja Pinjaman LN	15.485.200.000	14.168.325.516	11.650.673.000	10.573.272.759
Belanja Hibah LN	7.073.397.000	3.912.067.200	1.119.000.000	-
Belanja Rupiah Murni Pendamping	11.393.500.000	10.524.939.227	2.458.551.000	2.003.060.499
Belanja Hibah Dalam Negeri	5.000.000.000,-	5.000.000.000	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.373.076.597.000</b>	<b>1.332.753.316.526</b>	<b>1.196.814.654.000</b>	<b>1.148.422.309.743</b>

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010. Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp. 1.392.578.148.962,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 541.979.955.731,-, Aset Tetap sebesar Rp. 837.473.504.725,- dan Aset lainnya sebesar Rp. 13.124.688.506,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp. 4.861.189.290,-** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp. 1.387.716.959.672,-** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 537.118.766.441,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 850.598.193.231,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel : 2**

	(dalam rupiah)		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31-12- 2010	31-12- 2009	
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	541.979.955.731	436.697.792.948	105.282.162.783
Aset Tetap	837.473.504.725	806.783.276.913	30.690.227.812
Aset Lainnya	13.124.688.506	10.926.938.856	2.197.749.650
<b>Kewajiban</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	4.861.189.290	1.803.235.206	3.057.954.084
<b>Ekuitas Dana</b>			
Ekuitas Dana Lancar	537.118.766.441	434.894.557.742	102.224.208.699
Ekuitas Dana Investasi	850.598.193.231	817.710.215.769	32.887.977.462

## 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

#### Rencana Strategis

#### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BKKBN

Rencana Strategis BKKBN meliputi :

- a. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen;
- b. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (*unmet need*) dari 9,1 persen (SDKI 2007), menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur;
- c. Meningkatnya Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun;
- d. Menurunnya *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan;
- e. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen;
- f. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen;

- g. Meningkatnya kesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-KS dan KS-1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen;
- h. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja;
- i. Menurunnya disparitas TFR, CPR, dan *unmetneed* antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi);
- j. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya;
- k. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota;
- l. Meningkatnya jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (*Informed Consent*) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen;

*Pendapatan*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.353.430.913,-, realisasi PNBP pada BKKBN merupakan penerimaan biasa seperti tabel berikut di bawah ini :

**Tabel : 3**  
Daftar Pendapatan PNBP

Uraian	TA. 2010		TA. 2009	
	Rp		Rp	
Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen	Rp	3.800.000	Rp	8.725.000
Pendapatan Penjualan rumah,gedung, bangunan	Rp	-	Rp	5.816.614
Pendapatan dari penutupan rekening	Rp	-	Rp	200
Pendapatan Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.200.000	Rp	61.200.000
Pendapatan Sewa benda tak bergerak	Rp	27.500.000	Rp	-
Pendapatan bunga lainnya	Rp	-	Rp	12.015.424
Penerimaan kembali bel lainnya hibah TAYL	Rp	-	Rp	23.167.200
Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp	7.122.151.025	Rp	1.068.000
Pendapatan Penjualan Sewa Beli	Rp	-	Rp	2.200.000
Pendapatan Penjualan Aset lainnya yg Rusak/dihapuskan	Rp	302.764.000	Rp	124.500.00
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/rumah negeri	Rp	30.628.077	Rp	27.842.605
Pendapatan Sewa Gdg,Bangunan & Gudang	Rp	955.347.800	Rp	389.014.589
Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp	-	Rp	20.154.000
Pendapatan Jasa Lembaga keu (Jasa Giro)	Rp	37.830.418	Rp	80.290.605
Penerimaan kembali persekot uang muka gaji	Rp	-	Rp	9.341.000
Pendapatan Jasa II Lainnya	Rp	-	Rp	1.774

Penerimaan Kembali Belanj Peg Pst TAYL	Rp	368.802.723	Rp	68.534.828
Penerimaan Kembali Belanj Lainnya RM TAYL	Rp	5.687.579.231	Rp	220.204.731
Penerimaan Kembali Belanj Lainnya Pinj.LN AYL	Rp	1.600.000	Rp	-
Pendptan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara (TP/TGR)	Rp	720.502.295	Rp	248.088.810
Pendptan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp	8.689.229	Rp	47.503.427
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp	1.053.912.016	Rp	46.745.021
Pendapatan bunga lainnya	Rp	88.599	Rp	-
Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	Rp	22.900.000	Rp	-
Pendapatan Bea Lelang	Rp	8.135.500	Rp	-
<b>JUMLAH PNPB.....</b>	<b>Rp</b>	<b>16.353.403.913</b>	<b>Rp</b>	<b>1.396.413.828</b>

Realisasi pendapatan BKKBN TA. 2010 adalah sebesar Rp. 16.353.403.913,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar 1.071,10% dari realisasi pendapatan TA. 2009 sebesar Rp. 1.396.413.828,-.

#### *Belanja*

Belanja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

**Tabel : 4**  
Komposisi Belanja

NO	URAIAN	REALISASI 2010 (Rp)	REALISASI 2009 (Rp)	% Naik/ (turun)
1	Belanja Pegawai	166.396.238.631	155.792.750.366	6,81
2	Belanja Barang	1.147.963.901.572	945.954.167.787	21,36
3	Belanja Modal	18.393.176.323	30.750.391.590	(40,19)
4	Belanja Sosial	-	15.925.000.000	(100)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.332.753.316.526</b>	<b>1.148.422.309.743</b>	<b>16,05</b>

Realisasi belanja BKKBN TA. 2010 adalah sebesar Rp. 1.332.753.316.526,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar 16,05% dari realisasi belanja TA. 2009 sebesar Rp. 1.148.422.309.743,-.

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BKKBN, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BKKBN disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan satuan kerja.

BKKBN Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 1.373.076.597.000,- yang terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 1.345.518.000.000,- dan Pinjaman dan Hibah sebesar Rp. 27.558.597.000,- pada 42 satuan kerja pusat dan daerah meliputi :

- 9 satuan kerja Pusat (KP) sebesar Rp. 733.252.257.000,-
- 32 Satuan Kerja Daerah (KD) sebesar Rp. 633.190.365.000,-
- 1 Satuan Kerja Dekonsentrasi (DK) DKI Jakarta sebesar Rp. 6.633.975.000,-

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Satuan kerja membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan (LK) BKKBN yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BKKBN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BKKBN dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

*Kebijakan Akuntansi*

**A. 4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BKKBN adalah :

## Pendapatan

### (1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

## Belanja

### (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

## Aset

### (3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dicatat di neraca adalah berdasarkan harga pembelian terakhir;

## *Investasi*

### **b. Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

#### (i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjaman melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjaman kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

#### (ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara



(PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

#### *Aset Tetap*

#### **c. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2010 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam Laporan Keuangan Tahun 2010, seluruh aset tetap yang dikelola belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut.

#### d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

#### (4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### (5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah Rp.  
16,353M.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp.16.353.430.913,- dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp.1.332.753.316.526,- atau 97,06% dari yang dianggarkan, terdiri dari:

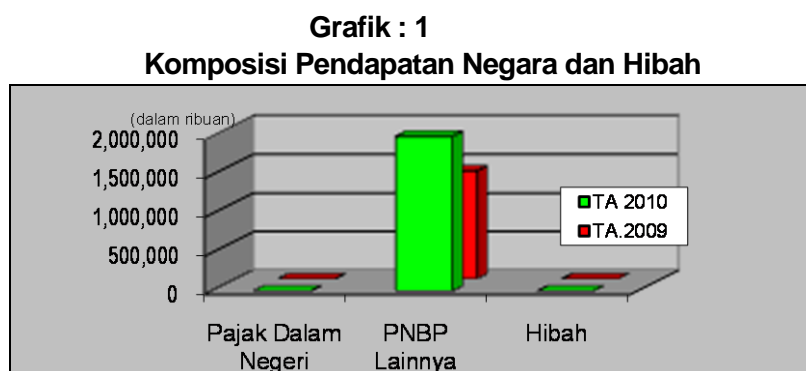
1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah :
  - a. Penerimaan Perpajakan Rp. 0,-
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 16.353.430.913,-
2. Realisasi Belanja Negara
  - a. Belanja Rupiah Murni Rp. 1.299.147.984.583,-
  - b. Belanja Pinjaman Luar Negeri Rp. 14.168.325.516,-
  - c. Belanja Pinjaman Dalam Negeri Rp. -
  - d. Belanja Hibah Luar Negeri Rp. 3.912.067.200,-
  - e. Belanja Rupiah Murni Pendamping Rp. 10.524.939.227,-
  - f. Belanja Hibah Dalam Negeri Rp. 5.000.000.000,-

### B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

BKKBN tidak mempunyai estimasi pendapatan, namun realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 sebesar Rp. 16.353.430.913,- ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak biasa.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



#### B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 sebesar Rp. 16.353.430.913,- Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 yaitu sebesar Rp. 1.396.413.828,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 14.957.017.085,-.

Realisasi  
PNBP Lainnya  
Rp. 16,353 M

#### B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2010 sebesar Rp. 16.353.430.913,- Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2009 sebesar Rp. 1.396.413.828,-, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 14.957.017.085,-.

Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

**Tabel : 5**  
Realisasi PNBP TA. 2010 dan 2009

Uraian	TA. 2010		TA. 2009	
Pendapatan Penujulan Dokumen-Dokumen	Rp	3.800.000	Rp	8.725.000
Pendapatan Penjualan rumah,gedung, bangunan	Rp	-	Rp	5.816.614
Pendapatan dari penutupan rekening	Rp	-	Rp	200
Pendapatan Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.200.000	Rp	61.200.000
Pendapatan Sewa benda tak bergerak	Rp	27.500.000	Rp	-
Pendapatan bunga lainnya	Rp	-	Rp	12.015.424
Penerimaan kembali bel lainnya hibah TAYL	Rp	-	Rp	23.167.200
Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp	7.122.151.025	Rp	1.068.000
Pendapatan Penjualan Sewa Beli	Rp	-	Rp	2.200.000
Pendapatan Penjualan Aset lainnya yg rusak/dihapuskan	Rp	302.764.000	Rp	124.500.00
Pendapatan Sewa Rumah Dinas/rumah negeri	Rp	30.628.077	Rp	27.842.605
Pendapatan Sewa Gdg,Bangunan & Gudang	Rp	955.347.800	Rp	389.014.589
Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp	-	Rp	20.154.000
Pendapatan Jasa Lembaga keu (Jasa Giro)	Rp	37.830.418	Rp	80.290.605
Penerimaan kembali persekot uang muka gaji	Rp	-	Rp	9.341.000
Pendapatan Jasa II Lainnya	Rp	-	Rp	1.774
Penerimaan Kembali Belanj Peg Pst TAYL	Rp	368.802.723	Rp	68.534.828
Penerimaan Kembali Belanj Lainnya RM TAYL	Rp	5.687.579.231	Rp	220.204.731
Penerimaan Kembali Belanj Lainnya Pinj.LN AYL	Rp	1.600.000	Rp	-
Pendptan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara (TP/TGR)	Rp	720.502.295	Rp	248.088.810
Pendptan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp	8.689.229	Rp	47.503.427
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp	1.053.912.016	Rp	46.745.021
Pendapatan bunga lainnya	Rp	88.599	Rp	-
Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	Rp	22.900.000	Rp	-
Pendapatan Bea Lelang	Rp	8.135.500	Rp	-
JUMLAH PNBP.....	Rp	16.353.430.913	Rp	1.396.413.828

Penjelasan :

1. Masih terdapat PNBP yang dikelola oleh Guest House Graha Kencana (GHGK) BKKBN yang belum disetor ke kas negara dandigunakan langsung untuk pengelolaan Guest House. Selama tahun 2010 GHGK memperoleh pendapatan sebesar Rp.

2.891.986.598,- dan telah dikeluarkan untuk pengelolaan operasional dan honor pegawai GHGK sebesar Rp. 2.763.446.094,- sehingga sisa saldo Rp. 128.540.504,-.

2. BKKBN Provinsi Jawa Barat menggunakan anggaran belanja untuk kegiatan diklat berupa prajabatan CPNSD sebesar Rp. 5.884.578.976,- yang dananya bersumber dari Kabupaten Subang sebesar Rp. 3.383.500.000,-, Kotamadya Bekasi sebesar Rp. 1.318.350.000,- dan Kab. Purwakarta sebesar Rp. 1.182.728.976,-. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena Balatbang KBN Bandung telah memiliki Setifikat LAN RI Nomor : 925/I/X/VIII/2005 yang menyatakan bahwa Pusat Pelatihan Pegawai dan Tenaga Program BKKBN memnuhi kualifikasi dan telah terakreditasi untuk menyelenggarakan program diklat ; (1) Prajabatan Golongan I, II, III, (2) Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III, sehingga Pemda Kab/Kota mengadakan kerja sama dengan Balatbang KB Bandung untuk menyelenggarakan Prajabatan Pemda Kab/Kota.
3. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan telah menyajikan nilai Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 di lingkungan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 113.210.181,- yang bersumber dari pendapat sewa rumah dinas, pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang dan pendapatan penjualan asetlainnya yang dihapuskan, serta pendapatan TGR. Namun BKKBN Provinsi telah menerima pendapatan (PNBP) sebesar Rp. 21.182.800,- yang berasal dari penyewaan aula dan penginapan Balatbang, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 2.363.240,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.819.560,- digunakan untuk biaya operasional dan kebersihan, hal tersebut dikarenakan tahun 2010 Balatbang tidak mendapatkan alkoasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

### **B.2.2. Belanja Negara**

*Realisasi Bersih  
Belanja Negara  
Rp. 1.332,753 M*

Realisasi belanja negara setelah dikurangi potongan pengembalian belanja dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp. 1.332.753.316.526,- (97,06%). Sedangkan jumlah realisasi belanja negara yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 sebesar Rp. 1.148.422.309.743,- (95,96%). Jika dibandingkan realisasi belanja TA 2010 dengan TA 2009 terjadi kenaikan sebesar 16,05%.

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Belanja Hibah.

**Tabel: 6**  
Perbandingan Realisasi Belanja Per Sumber TA 2010 dan 2009

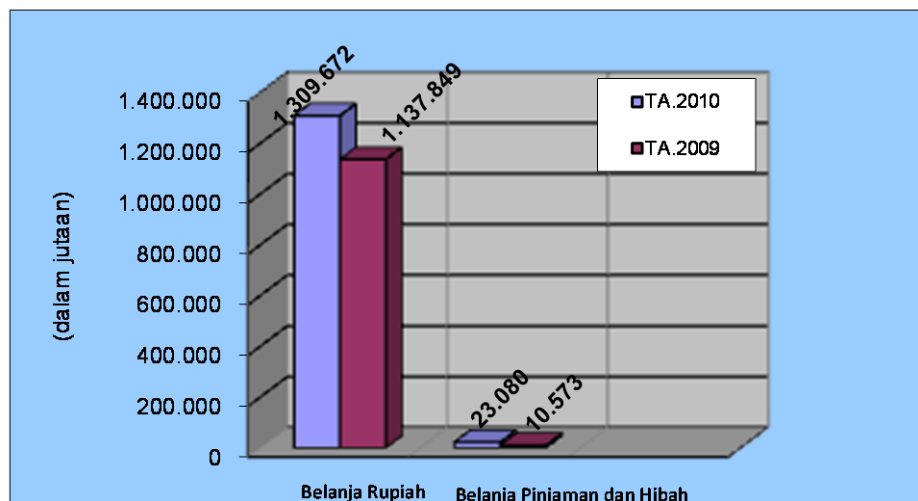
Uraian	REALISASI TA 2010	REALISASI TA 2009	% Naik/ (turun)
Belanja Rupiah Murni	Rp 1.309.672.923.810	Rp 1.137.849.036.984	15,10
Belanja Pinjaman dan Hibah LN	Rp 23.080.392.716	Rp 10.573.272.759	118,28
Total	Rp 1.332.753.316.526	Rp 1.148.422.309.743	16,05

Ket. :

*Realisasi belanja negara setelah dikurangi potongan pengembalian*

Komposisi alokasi realisasi belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

**Grafik : 2**  
Komposisi Alokasi Realisasi Belanja TA 2010 dari total realisasi



*Realisasi  
Belanja Bersih  
Rp. 1.332,753 M*

#### **B.2.2.1. Belanja**

Realisasi belanja negara menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 secara total sebesar Rp. 1.332.753.316.526,- (97,06%). Sedangkan jumlah realisasi belanja negara menurut jenis belanja dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 secara total sebesar Rp. 1.148.422.309.743,- (95,96%).

Jika dibandingkan realisasi belanja TA 2010 dengan TA 2009 terjadi kenaikan sebesar 16,05%.

**Tabel : 7**  
Realisasi Perbandingan Per Belanja TA.2010 dan 2009

Uraian	REALISASI TA 2010	REALISASI TA 2009	% Naik/ (turun)
Belanja Pegawai	Rp. 166.396.238.631	Rp. 155.792.750.366	<b>6,81</b>
Belanja Barang	Rp. 1.147.963.901.572	Rp. 945.954.167.787	<b>21,36</b>
Belanja Modal	Rp. 18.393.176.323	Rp. 30.750.391.590	<b>(40,19)</b>
Bantuan Sosial	Rp -	Rp 15.925.000.000	<b>(100)</b>
Total	Rp. 1.332.753.316.526	Rp. 1.148.422.309.743	<b>16,05</b>

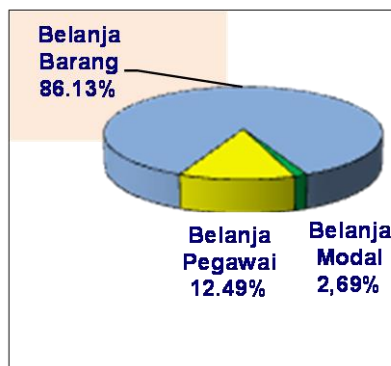


*Belanja  
menurut Jenis  
Belanja*

Komposisi realisasi Belanja menurut jenis belanja dari jumlah realisasi dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

**Grafik : 3**

**Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2010**



*Belanja  
Pegawai  
Rp. 166,396 M*

**B.2.2.2. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 166.396.238.631,- atau 95,38% dari anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Pegawai dari jumlah yang dianggarkan DIPA TA 2009 sebesar Rp. 155.792.750.366,- atau 6,80% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Rincian realisasi Belanja Pegawai dapat disajikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel : 8**

**Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dan 2009**

URAIAN	T A .2010 (Rp)	T A.2009 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	164.205.518.631	154.100.615.666	6,88
Belanja Honorarium	328.725.000	262.458.200	25,25
Belanja Lembur	1.861.995.000	1.400.626.500	32,94
Belanja Vakasi	0	18.000.000	(100)
Belanja Pegawai Transito	0	11.050.000	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>166.396.238.631</b>	<b>155.792.750.366</b>	<b>6,66</b>

*Belanja Barang  
Rp. 1.147,963 M*

**B.2.2.3. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 1.147.963.901.572,- atau 97,35%, sedangkan realisasi Belanja Barang dari jumlah yang dianggarkan DIPA TA 2009 sebesar Rp. 945.954.167.787,- atau 97,04%,  
Jika dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2010 dengan realisasi Belanja barang TA 2009 secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 21,36%.

**Belanja barang sumber dana dari rupiah murni :**

Realisasi Belanja Barang sumber dana dari rupiah murni dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar **Rp. 1.125.435.670.856,-** atau **97,68%**, sedangkan realisasi Belanja Barang dari jumlah yang dianggarkan DIPA TA 2009 sebesar Rp. 935.380.895.028,- atau 97,23%,  
Jika dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2010 dengan realisasi Belanja barang TA 2009 secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 20,32%.

**Belanja barang sumber dana dari pinjaman dan hibah :**

1. Dalam tahun 2010 BKKBN provinsi Jawa Barat menerima belanja barang yang bersumber dari hibah langsung berupa uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,-, dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri dari Belanja Barang sebesar **Rp. 4.529.700.000,-** (berdasarkan surat keputusan Kepala BKKBN Jawa Barat nomor : 733/HK.102/H.1/2010 tanggal 15 Maret 2010 kepada Operasional Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung kegiatan Program KB Jawa Barat TA 2010) dan Belanja Modal sebesar Rp. 470.300.000,- (berupa 2 unit kendaraan roda 4). Berdasarkan SP2D Pengesahan no : 01361, 01362, 01363, dan 01364/HDNL/2010, tgl. 31-12-12010),
2. Tahun 2010 BKKBN Satker Direktorat Advokasi dan KIE (Ditvok) BKKBN Pusat memperoleh Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Langsung berupa uang dari UNFPA sebesar Rp. 2.656.312.000,- dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 2.656.312.000,- (berdasarkan Surat Pengantar DJPB Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-181/Pb.2/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal revisi DIPA ketiga Satker Ditvok tanggal 31 Desember 2010 dan telah diterbitkan SP3H).
3. Tahun 2010 BKKBN (Satker Puslitbang KBKR) juga telah menerima hibah langsung dari USAID melalui Macro International Inc. Sebesar Rp. 4.417.085.000,- dan sudah mendapat persetujuan revisi DIPA dari DJPB tanggal 29 Nopember 2010, dan tercatat dalam LRA Satker Puslitbang tahun 2010 sebagai anggaran belanja yang bersumber dari hibah sebesar Rp. 4.417.085.000,-, dan telah di realisasikan di dalam LRA tahun 2010 tercatat sebesar Rp.1.255.755.200,- (SP3H per 31 Desember 2010). Sisanya anggaran sebesar Rp. 3.161.329.800,- di luncurkan pada tahun anggaran 2011.

Rincian realisasi Belanja Barang dapat disajikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel : 9**  
Rincian realisasi Belanja Barang TA 2010 dan 2009

URAIAN	T.A. 2010 (Rp)	T.A. 2009 (Rp)	%Naik/ (turun)
Belanja Barang Operasional	34.739.209.020	35.046.683.007	(0,88)
Belanja Barang Non Operasional	832.175.271.992	666.467.629.672	24,86
Belanja Jasa	35.540.011.995	32.524.345.393	9,27
Belanja Pemeliharaan	26.013.422.591	24.527.409.166	6,06
Belanja Perjalanan	216.908.145.241	187.388.100.549	16,07
<b>Jumlah</b>	<b>1.147.963.901.572</b>	<b>945.954.167.787</b>	<b>21,14</b>

*Belanja Modal  
Rp.18,393 M*

**B.2.2.4. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp.18.393.176.323,- atau 94,54%, sedangkan realisasi Belanja Modal dari jumlah yang dianggarkan DIPA TA 2009 sebesar Rp. 30.750.391.590,- atau 97,31%.

Jika dibandingkan realisasi belanja modal antara TA 2010 dengan TA 2009 terjadi penurunan sebesar 40,19%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk pembelian 2 unit kendaraan roda 4 sebesar **Rp. 470.300.000,-** yang dibeli dari Penerimaan Hibah langsung Uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BKKBN Provinsi Jawa barat sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Rincian realisasi Belanja Modal dapat disajikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel : 10**  
Rincian realisasi Belanja Modal TA 2010 dan 2009

URAIAN	T.A. 2010 (Rp)	T.A. 2009 (Rp)	%Naik/ turun
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.910.550.250	23.277.784.863	(48,83)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.481.035.768	6.762.035.352	(23,37)
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	176.032.325	300.745.975	(41,47)
Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi	-	-	-
Belanja Modal Fisik Lainnya	825.557.980	409.825.400	101,44
<b>Jumlah</b>	<b>18.393.176.323</b>	<b>30.750.391.590</b>	<b>(40,19)</b>

*Belanja  
Bantuan Sosial*

**B.2.2.5. Bantuan Sosial**

Pada tahun anggaran 2010 untuk bantuan sosial tidak dianggarkan lagi, sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,- atau 99,62% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 15.985.000.000,-. Rincian realisasi Bantuan Sosial dapat disajikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel : 11**  
Rincian realisasi Bantuan Sosial TA 2010 dan 2009

URAIAN	T.A. 2010 (Rp)	T.A. 2009 (Rp)	% Naik/ (turun)
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	-	15.925.000.000	(100)
<b>Jumlah</b>	-	15.925.000.000	(100)

### C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

#### C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel : 12**

URAIAN	31 Desember 2010 (Rp)	31 Desember 2009 (Rp)	Naik/(turun) Rp.
Aset	1.392.578.148.962	1.254.408.008.717	138.170.140.245
Kewajiban	4.861.189.290	1.803.235.206	3.057.954.084
Ekuitas Dana	1.387.716.959.672	1.252.604.773.511	135.112.186.161

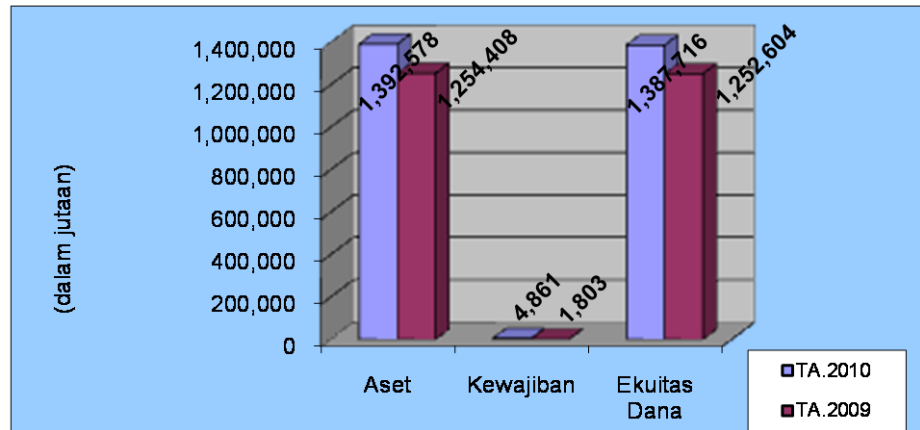
Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.392.578.148.962- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 541.979.955.731,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 837.473.504.725,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.13.124.688.506,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.861.189.290,- merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.387.716.959.672,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 537.118.766.441,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 850.598.193.231,-.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini :

**Grafik : 4.  
Komposisi Neraca**



## C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

### C.2.1. Aset Lancar

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.3,043 M*

#### C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran:

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.043.143.972,- dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.789.307.119,-.

**Tabel : 13**

Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA. 2010

No.	Kode	Uraian	Jumlah
1.	017326	Sestama	Rp. 11.850.300
2.	018445	Sulawesi Utara	Rp. 12.430.505
3.	018562	NTB	Rp. 1.280.000
4.	433067	Sulawesi Tenggara	Rp. 78.142.125
5.	631610	Banten	Rp. 50.289.500
6.	649490	Deputi IKPK	Rp. 118.268.426
7.	649505	Deputi KBKR	Rp. 1.931.226.155
8.	649512	Deputi KSPK	Rp. 291.961.737
9.	649526	Deputi Latbang	Rp. 265.056.737
10.	666781	BPMPKB DKI	Rp. 150.000
11.	668419	Ditvok	Rp. 373.521.312
12.	668423	Puslitbang	Rp. 147.669.562
<b>Total</b>			<b>Rp. 3.043.143.972</b>

*Kas di  
Bendaharawan  
Penerima  
Rp.6.253,-*

#### C.2.1.2 Kas di Bendaharawan Penerima :

Kas pada Bendaharawan Penerima per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 6.253,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 6.253,-.

*Kas lainnya dan  
setara kas  
Rp.1,4M,-*

#### C.2.1.3 Kas lainnya dan Setara kas :

Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.418.702.072 yang terdiri dari sisa kas hibah UNFPA sebesar Rp. 5.314.562,- dan sisa kas hibah USAID sebesar Rp. 1.413.387.510,-

*Piutang pajak  
Rp 0,-*

#### C.2.1.4 Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak secara total per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 adalah nihil.

Piutang Bukan Pajak Rp.6,080 M,-

C.2.1.5 Piutang Bukan Pajak

- Sejak tahun 2006 s/d tahun 2009, BKKBN telah mendapatkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.59.859.000.000,- dengan rincian sbb : tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- tahun 2008 sebesar Rp. 23.970.000.000,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,- Pada periode tahun anggaran 2006 dan 2007 merupakan belanja bantuan sosial, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 332/HK.010/F3/2008 tanggal 22 Juli 2008 dana bantuan modal diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS.
- Berdasarkan realisasi jumlah pengiriman dana bantuan modal usaha ke kelompok UPPKS yang berasal dari APBN Pusat dan APBN Provinsi berdasarkan SPM/SP2D pada periode 22 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 19.670.000.000,-
- Perkembangan pengembalian sisa dana kelompok UPPKS yang sudah disetor ke kas Negara s/d tanggal 24 desember 2010 Rp. 13.589.568.032,- dari dana sebesar Rp. 19.670.000.000,-, sehingga dana UPPKS yang masih belum dikembalikan sebesar **Rp.6.080.431.968,-** (out standing) berda di provinsi dan SKPD kab/kota. BKKBN akan segera menginventarisir dan menarik kembali dana UPPKS tersebut untuk disetorkan ke kas Negara.

BLT TPA Rp.0,- C.2.1.6

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 adalah nihil.  
Tagihan Penjualan Angsuran secara total per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 adalah nihil.

BL TGR Rp.0,- C.2.1.7

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,- dan per 31 Desember 2009 adalah nihil.

Piutang lain-lain Rp.0,- C.2.1.8

Piutang Lain-lain  
Piutang lainnya secara total per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 adalah nihil.

Persediaan Rp. 531,437 M C.2.1.9

Persediaan  
Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 531.437.671.466,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 415.238.478.576,-.

**Tabel : 14**  
Rincian Persediaan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Barang Konsumsi	Rp. 1.006.937.065
2.	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp. 65.933.000
3.	Jumlah Suku Cadang	Rp. 1.065.033.980
4.	Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp. 526.290.322.401
5.	Persediaan untuk tujuan Strategi/ Berjaga-jaga Lainnya	Rp. 89.274.300
6.	Persediaan Lainnya	Rp. 2.290.170.720
	<b>Total</b>	<b>Rp. 531.437.671.466</b>

Terdapat persediaan BKKBN Pusat yang dititipkan di gudang pihak lain senilai Rp. 275.609.574.653,- (*terlampir*).

*Aset Tetap*  
Rp. 837,473M

**C.2.2. Aset Tetap**

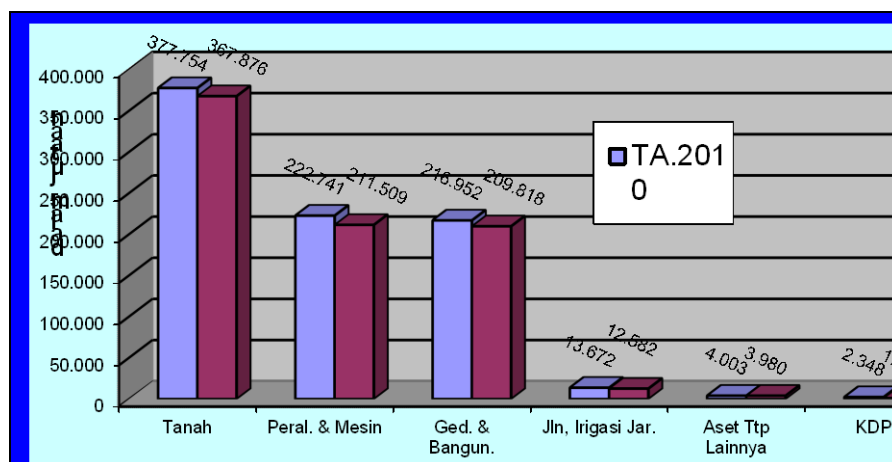
Aset Tetap secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 837.473.504.725,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 806.783.276.913,-.

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel : 15**  
Posisi Aset Tetap

Nama Perkiraan	TA. 2010 (Rp)	TA. 2009 (Rp)	Naik / Turun
Tanah	377.754.240.518	367.876.320.880	9.877.919.638
Peralatan dan Mesin	222.741.572.491	211.509.983.229	11.231.589.262
Gedung dan Bangunan	216.952.721.703	209.818.916.379	7.133.805.324
Jalan,Irigasi dan Jaringan	13.672.949.891	12.582.374.611	1.090.575.280
Aset Tetap Lainnya	4.003.175.122	3.980.731.814	22.443.308
Konstruksi dlm Pengerjaan	2.348.845.000	1.014.950.000	1.333.895.000
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>837.473.504.725</b>	<b>806.783.276.913</b>	<b>30.690.227.812</b>

**Grafik : 5**  
Posisi Aset Tetap





C.2.2.1 Tanah  
Tanah secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 377.754.240.518,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 367.876.320.880,-.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan Mesin secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 222.741.572.491,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 211.509.983.229,-.

*Dari peralatan tersebut terdapat aset tetap berupa Microsoft Exchange Server sebanyak 3 unit sebesar Rp. 16.730.000,- yang berada di Pihak Ketiga untuk keperluan back up data BKKBN. Aset tersebut berada di PT. Telkom Jawa Timur dengan bukti berupa Surat Masuk Barang Nomor: C.Tel.../SMBColo-GB/.../2010 tanggal 18 September 2010.*

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan  
Gedung dan Bangunan secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 216.952.721.703,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 209.818.916.379,-.

*Dari nilai gedung dan bangunan tersebut terdapat 5 (lima) unit gedung kantor BKKBN Provinsi (NTB, Kalsel, Bali, Jatim, dan Jabar) yang berdiri di atas tanah milik Pemda dan milik Kemenkes, dengan nilai total asset sebesar Rp. 23.146.100.723,- (rincian terlampir)*

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Jalan, Irigasi dan Jaringan secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 13.672.949.891,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 12.582.374.611,-.

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya  
Aset Tetap Lainnya secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.003.175.122,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.980.731.814,-.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Konstruksi Dalam Pengerjaan secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.348.845.000,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.014.950.000,-

*Aset Lainnya  
Rp.13,124  
M,-*

**C.2.3. Aset Lainnya**  
Aset Lainnya secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 13.124.688.506,- dan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 10.926.938.856,-

C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran  
TPA secara total per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah nihil.

C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
TP/TGR secara total per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 nihil.

C.2.3.3 Aset Tak Berwujud  
Aset tak berwujud secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.714.523.000,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 9.202.474.988,-

<i>Aset lain-lain Rp. 2,410 M</i>	<p>C.2.3.4. <b>Aset Lain-lain</b> Aset Lainnya secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.410.165.506,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.724.463.868,-</p>
<i>Kewajiban Jangka Pendek Rp. 4,861 M</i>	<p>C.2.4. <b>Kewajiban Jangka Pendek</b> Kewajiban Jangka Pendek secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.861.189.290,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.803.235.206,-. Jika dibandingkan antara TA 2010 dengan TA 2009 terjadi kenaikan sebesar 169,58%.</p> <p>C.2.4.1. <b>Utang kepada pihak ketiga</b> Utang kepada Pihak Ketiga secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 399.336.993,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 13.920.834,-.</p> <p>C.2.4.2 <b>Uang Muka dari KPPN</b> Uang Muka dari KPPN secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.043.143.972,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.789.307.119,- yang merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>C.2.4.3 <b>Pendapatan Yang Ditangguhkan</b> Uang Muka dari KPPN secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.418.708.325,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 7.253,-.</p>
<i>Ekuitas Dana Lancar Rp. 537,118 M</i>	<p><b>C.2.5. Ekuitas Dana Lancar</b> Ekuitas Dana Lancar secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 537.118.766.441,- dan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 434.894.557.742,-.</p> <p>C.2.5.1 <b>Cadangan Piutang</b> Cadangan Piutang secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 6.080.431.968,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 19.670.000.000,-.</p> <p>C.2.5.2 <b>Cadangan Persediaan</b> Cadangan Persediaan secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 531.437.671.466,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 415.238.478.576.</p> <p>C.2.5.3 <b>Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2010 (Rp. 399.336.993,-) dan per 31 Desember 2009 (Rp. 13.920.834,-).</b></p>
<i>Ekuitas Dana investasi Rp.850,598 M</i>	<p><b>C.2.6 Ekuitas Dana Investasi</b> Ekuitas Dana Investasi secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 850.598.193.231,- dan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 817.710.215.769,-</p>

- C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2010 nihil.
- C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 837.473.504.725,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 806.783.276.913,-.
- C.2.6.3 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 13.124.688.506,- dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 10.926.938.856,-.

*Pengungkapan Penting Lainnya*

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK**

#### **D.1.1. TP 4 :**

Sistem Pencatatan Piutang Bukan Pajak BKKBN Belum Memadai untuk Meyakinkan Kelengkapan dan keakuratan Piutan yang Dilaporkan.

#### **Komentar Instansi :**

*Telah dilakukan koreksi kurang catat neraca piutang bukan pajak sebesar Rp.3.715.000.000,- yang merupakan dana yang dikelola langsung SKPD-KB Kab/Kota di 7 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, NTT, Kalsel, dan Papua Barat) sebesar Rp. 3.675.000.000,- dan 2 provinsi ( Lampung dan Sulteng) sebesar Rp. 40.000.000,- yang dianggap tidak cair. Sehingga dalam neraca piutang bukan pajak tercatat sebesar **Rp. 6.080.431.968,-** yang sebelumnya tercatat dalam LRA TA. 2010 Unaudited neraca piutang bukan pajak sebesar Rp. 2.365.431.968,-*

#### **D.1.2. TP 6 :**

Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran pada BKKBN TA 2010 tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan diantaranya : Belanja Barang (MAK 52) digunakan untuk Belanja Modal (MAK 53) dengan jumlah sebesar Rp. 2.286.818.010,-. Jumlah tersebut sudah dilakukan koreksi dan sudah disesuaikan ke dalam Neraca sebagai penambahan pada Aset Tetap.

#### **Komentar Instansi :**

- 1. Pada saat Finalisasi Penyusunan Program dan Anggaran serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah dilakukan sosialisasi Bagan Akun Standar (BAS) kepada seluruh Perencana Komponen Pusat dan Provinsi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta dibagikan buku petunjuk BAS;*
- 2. Pada saat Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program KB Nasional (KOREN) atas Penyusunan Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengikut sertakan Aparat Pengawasan Intern Pusat dan Provinsi untuk melakukan review;*

3. Untuk penyusunan anggaran yang akan datang (Tahun Anggaran 2011) akan dilakukan sosialisasi kembali tentang BAS terutama untuk belanja barang dan belanja modal;
4. Akan dilakukan evaluasi terhadap RKAKL tahun 2011, apabila ditemukan kesalahan penempatan menurut BAS, apabila dimungkinkan akan dilakukan revisi.
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih teliti dalam mempertanggungjawabkan belanja pada kegiatan-kegiatan Satker, dan melaporkan kepa Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN jika di dalam RKAKL terjadi kesalahan belanja untuk di lakukan revisi.
6. Memerintahkan kepada Pejabat Penerbit SPM harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen permintaan pembayaran.
7. Memerintahkan kepada Satker untuk melakukan koreksi kurang catat yang diakibatkan kesalahan penggunaan belanja

#### **D.1.3. TP 11.1 :**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Guest House Graha Kencana (GHGK) BKKBN sebesar Rp. 2.102.512.146,- pada Tahun 2010 tidak Disetorkan ke Kas Negara, Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN dan Tidak Ada Dasar Hukumnya.

#### **Komentar Instansi :**

1. Menanggapi rekomendasi BPK beberapa waktu yang lalu, BKKBN telah menghentikan pemanfaatan GHGK sesuai instruksi Kepala BKKBN tahun 2009 sampai mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, yang pada saat ini proses pemanfaatan BMN Graha Kencana sudah ada pada Kementerian Keuangan.
2. BKKBN akan memantau dan melakukan koordinasi terus dengan DJKN untuk mempercepat penerbitan persetujuan pemanfaatan GHGK oleh Menteri Keuangan.
3. Menata kembali pengelolaan Guest House Graha Kencana (GHGK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan PNBP yang diperoleh dari pengelolaan GHGK, dan meninjau kembali surat perjanjian kerja sama antara GHGK dengan Koperasi Warga Kencana.
4. Segera menyetorkan kembali PNBP dan Jasa giro ke Kas Negara sebesar **Rp. 128.540.504,-** (Saldo awal Rp. 789.474.452,- + Penerimaan Rp. 2.102.512.146,- dikurangi Pengeluaran Rp. 2.763.446.094,-).
5. Memerintahkan kepada jajaran Auditor, untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan GHGK.

#### **D.1.4. TP 12.1 :**

PNBP Balai Latihan dan Pengembangan KB Nasional Milik BKKBN Tahun 2010 yang tidak Disetorkan ke Kas Negara, Tidak Dilaporkan dan Digunakan Langsung Tanpa Melalui Mekanisme APBN sebesar Rp. 5.905.761.776,-

#### **Komentar Instansi :**

1. *BKKBN Provinsi Jawa Barat memiliki Balai Latihan dan Pengembangan (Balatbang) KB Nasional Bandung, selama tahun 2010 mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Kegiatan Diklat berupa Prajabatan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 5.884.578.976,- yang bersumber dari (APBD Kabupaten Subang sebesar Rp. 3.383.500.000,-, Kotamadya Bekasi sebesar Rp. 1.318.350.000,- dan Kab. Purwakarta sebesar Rp. 1.182.728.976,-).*

*Kegiatan tersebut dilaksanakan karena Balatbang KBN Bandung telah memiliki Setifikat LAN RI Nomor : 925/I/X/VIII/2005 yang menyatakan bahwa Pusat Pelatihan Pegawai dan Tenaga Program BKKBN memenuhi kualifikasi dan telah terakreditasi untuk menyelenggarakan program diklat ; (1) Prajabatan Golongan I, II, III, (2) Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III, sehingga Pemda Kab/Kota mengadakan kerja sama dengan Balatbang KB Bandung untuk menyelenggarakan Prajabatan Pemda Kab/Kota.*

*Dana APBD tersebut disimpan di Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung nomor rekening: 0-191-086-896 dengan kuasa pemegang rekening Kepala dan PUM Balatbang KBN Bandung. Saldo rekening per 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.799.934,- dan dari mutasi selama tahun 2010 sebesar Rp.5.540.554.138,- terdapat bunga sebesar Rp. 1.281.006,- dan mutasi kredit sebesar Rp. 5.538.754.204,- (termasuk biaya administrasi bank sebesar Rp. 256.204,-);*

2. *BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan telah menyajikan nilai Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 di lingkungan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 113.210.181,- yang bersumber dari pendapat sewa rumah dinas, pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang dan pendapatan penjualan aset lainnya yang dihapuskan, serta pendapatan TGR. Namun BKKBN Provinsi telah menerima pendapatan (PNBP) sebesar Rp. 21.182.800,- yang berasal dari penyewaan aula dan penginapan Balatbang, dan telah disetor ke kas negara sebesar **Rp. 2.363.240,-**, sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.819.560,- digunakan untuk biaya operasional dan kebersihan, hal tersebut dikarenakan tahun 2010 Balatbang tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan.*
3. *Memerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan UAKPA Satker Provinsi Kalsel agar melaporkan dan diungkapkan dalam CaLK Satker BKKBN Provinsi Kalsel*

Tahun 2010.

4. Memerintahkan kepada jajaran Auditor, untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan Kediklatan.

## **D.2. Rekening Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja. Sehubungan dengan Peraturan tersebut, Rekening BKKBN sampai dengan Semester II per 31 Desember 2010 terdapat rekening sebanyak antara lain:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran untuk menampung dana APBN sebanyak 42 rekening dengan saldo sebesar Rp. 373.522.308,23;
2. Rekening Bendahara Penerimaan untuk menampung PNPB sebanyak 1 rekening dengan saldo sebesar Rp. 6.253,-
3. Rekening Bendahara Pengeluaran untuk menampung dana bantuan UNFPA sebanyak 3 rekening dan 1 rekening USAID dengan total saldo sebesar Rp. 1.340.758.037,-.

*(rekening terlampir)*

## **D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual**

Selama tahun 2010 BKKBN menerima Pendapatan dan Belanja secara Akrual sampai 31 Desember 2010 di 20 Satker, yang merupakan Belanja Langganan Daya dan Jasa dan Belanja Gaji Pegawai dengan total realisasi menurut Basis Cash sebesar Rp. 8.482.170.333,- dan penyesuaian Akrual bertambah sebesar Rp. 399.336.993,-, sehingga realisasi menurut Basis Akrual adalah sebesar Rp. 8.881.507.326,- (*terlampir*).

## **D.4. Pengungkapan Lain-Lain**

### **D.4.1. Tanah Sengketa di Kaltim**

Sesuai dengan laporan dari BKKBN Prop. Kalimantan Timur, Sebidang tanah milik BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan gambar situasi Nomor : 1377/K/1983 seluas 1.257 M2 dengan Sertifikat No. 14 tahun 1996. Tanah tersebut berstatus Barang Milik/Kekayaan Negara dan Telah dilaporkan Kepada Menteri Keuangan RI melalui BKKBN Pusat dan tercatat sebagai barang inventaris BKKBN Prop. Kaltim No. 003/38.01.17.1001./031888/03782172. Sesuai dengan KIB tanah tersebut seharga Rp. 754.200.000,-

Tanah tersebut terletak di Jalan Perjuangan, Desa / Kelurahan Sempaja Kec. Samarinda Hilir Kotamadya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.

Sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Sarloto Darti, yang

dibeli dari H. Rauf seluas 500 M2 dengan harga Rp. 40.000.000,- (sesuai dengan pernyataan H. Rauf tgl 5 Maret 2007). H. Rauf adalah orang yang ikut mengukur tanah pada saat tanah akan disertifikatkan oleh BKKBN.

Atas perbuatan tersebut, BKKBN Kalimantan timur sangat dirugikan secara materiil maupun moril atas penyerobotan tanah tersebut. Berdasarkan fakta yang ada BKKBN Pusat telah menunjuk Biro Hukum, Organisasi dan Humas untuk membantu menyelesaikan kasus tanah yang ada di Kaltim. Saat ini sudah membuat TIM penyelesaian kasus Tanah dan sudah diproses sesuai jalur hukum.

#### ***D.4.2. Satus Beberapa Bangunan di 5 Provinsi***

Terdapat bangunan gedung kantor, gedung pendidikan, bangunan pos jaga, bangunan garasi, asrama, bangunan klinik, tempat ibadah yang berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan milik Kementerian Kesehatan. Bangunan tersebut berada di 5 provinsi (NTB, Kalsel, Bali, Jatim dan Jabar) dengan total asset senilai Rp. 23.146.100.723,- (*terlampir*)